



ච්චිඛිලු ආචාරිකුටි තැබි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 බලි ප්‍රාන්ත පාලන ආයතන
SEKRETARIAT DAERAH

පලමු තැනැත්තියාගේ කාර්යාල - තැබි (80235) | ආගමන කාර්යාල (0361) 224671
 Jalan Basuki Rahmat Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 224671
 Website: biroapbj.baliprov.go.id • Email: biroapbj@baliprov.go.id

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2023

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
6	Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Menggangu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
7	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat pada pelaksanaan tender/seleksi	Peserta tender berkompetisi secara sehat dan adil
8	Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa log in pengguna)	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
9	Data Pengguna LPSE	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 b Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
10	Data Penyedia di LPSE yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.; • Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; • Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ; 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
11	Data Proses Pemilihan Penyedia	UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 huruf b ,	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia , untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
12	LPSE Support	UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf h ,	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	LPSE Support berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya , sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada public	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
13	Data <i>log in</i> akses server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	UU ITE 11/2008 Pasal 17 huruf b dan c	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada public mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada system	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA BIRO PENGADAAN
 BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
I KETUT ADIARSA
 NIP. 19641231 198603 1 263



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE